

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku dari individu serta organisasi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi (Raufaidah, 2015). Perkembangan Ilmu ekonomi saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana salah satunya ditandai dengan berlangsungnya ilmu ekonomi yang berpadu dengan disiplin lainnya. Disiplin ilmu didalam hal perpaduan yang memiliki korelasi paling dekat dengan ilmu ekonomi merupakan ilmu psikologi. Hal ini disebabkan karena ilmu psikologi bisa memperluas pandangan dari para ekonom mengenai sikap manusia pada suatu aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi (Putra dan Sudibia, 2013). Luasnya pandangan para ekonom memberikan dampak yaitu indikator kesejahteraan manusia yang selalu digunakan serta dikembangkan dengan menambah faktor-faktor non ekonomi. Suatu pendekatan yang dilakukan guna mengukur suatu kesejahteraan dengan cara menggabungkan teknik yang digunakan oleh seorang psikolog serta teknik yang dipergunakan seorang ekonom merupakan pengertian dari kebahagiaan ekonomi (*Economics of Happiness*). Teori ini didasarkan pada teori ekonomi yang mana setiap individu selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan (utilitas) sehingga lebih jauh lagi, akan menghasilkan kebahagiaan (*happiness*) (Graham, 2009).

Selama beberapa tahun ini semakin diakui bahwa ukuran tingkat kesejahteraan penduduk penting untuk dicermati tidak saja hanya ukuran moneter (*beyond gross domestic product*). Indikator kesejahteraan disusun tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material (*welfare* atau *well-being*) saja, tetapi juga lebih mengarah kepada kondisi kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*) (BPS, 2017).

Saat ini, pembuat kebijakan fokus pada salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan, yaitu dengan menggunakan indeks kebahagiaan (*happiness index*). Indeks kebahagiaan adalah pengukuran yang lebih lengkap untuk mengembangkan kesejahteraan. Indeks kebahagiaan mengukur tingkat kebahagiaan berdasarkan persepsi subyektif setiap orang mengenai berbagai aspek yang ada pada kehidupannya. Indeks tersebut diharapkan dapat mengukur kesejahteraan berdasarkan kebutuhan non-materi yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan perkapita. Indikator kebahagiaan digunakan sebagai tolak ukuran untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan karena suatu kebahagiaan mencerminkan tingkat kebahagiaan yang dicapai oleh setiap individu (Kapteyn, Smith, & Soest, 2010).

Kebahagiaan atau kata lainnya yang dikenal sebagai kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kepuasan hidup (*life satisfaction*) adalah salah satu ukuran yang saat ini digunakan untuk melengkapi indikator objektif kesejahteraan individu, seperti tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi. Kebahagiaan umumnya bukan masalah utama dalam

ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, kesejahteraan seringkali berasal dari fungsi utilitas dari konsumsi barang atau jasa. Menurut Frey dan Stutzer (2000), konsep kebahagiaan lebih luas daripada konsep utilitas. Kebahagiaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas, meliputi utilitas pengalaman dan prosedural (Frey 2000). Tidak hanya apa yang dikonsumsi pada saat itu, tetapi juga bagaimana hal itu dialami di masa lalu (*experience utility*) dan proses untuk mencapai hasil yang diinginkan (*procedural utility*), sedangkan Diener (1999) mendefinisikan kesejahteraan subjektif sebagai evaluasi kognitif dan emosional seseorang terhadap hidupnya. Penilaian mencakup respons emosional terhadap peristiwa serta penilaian kognitif kepuasan kehidupan individu tersebut.

Kebahagiaan adalah tujuan akhir hidup setiap orang yang ada di dunia, pada kenyataannya setiap orang ingin bahagia dalam hidupnya (Frey dalam Putra dan Sudibia, 2013). Perasaan bahagia juga dapat memberikan efek positif pada kehidupan sehari-hari seseorang bahkan pada lingkungan sekitar karena kebahagiaan mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Dari sudut pandang Islam, kesejahteraan atau kebahagiaan dapat dicapai jika manusia melakukan segala aktivitasnya sesuai dengan hukum Islam atau dasar hukum syariah. Suatu keadaan dimana terdapat disparitas ekonomi antara si kaya dan si miskin dalam suatu masyarakat, dan faktor agama itu sendiri menciptakan suatu mekanisme ekonomi dimana mereka yang memiliki kelebihan harta menyumbangkan sebagian kekayaannya kepada mereka yang lebih membutuhkan, sehingga disparitas ekonomi

dapat dikurangi, tetapi tidak dihilangkan (Purwana, 2014). Adapun ayat Al-quran yang menjelaskan manfaat yang terkandung dalam QS. An-Nisa: 9 adalah sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Dapat dilihat pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kemakmuran dapat dicapai dengan bertakwa kepada Allah SWT dan bertutur kata yang baik. Didalam ayat ini juga dikatakan bahwa manusia harus memikirkan generasi selanjutnya, maka dari itu harus mempersiapkan generasi berikutnya dan mereka juga memiliki ketaqwaan kepada Allah SWT agar mereka memiliki kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan juga dimuat didalam pembukaan UUD 1945, dimana salah satu tujuan negara Indonesia pada alinea keempat adalah “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum...”.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program pembangunan yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, namun bukan hanya negara saja yang bertanggung jawab penuh melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Gross Domestic Product (GDP) telah digunakan sebagai indikator kemajuan ekonomi sejak dipublikasikan pertama kali pada Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944, dan sebagai indikator kesejahteraan umum sejak tahun 1960 an. Menurut Bergh (2009) menyatakan bahwa GDP mempunyai beberapa kelemahan diantaranya tidak mempertimbangkan biaya sosial seperti biaya eksternalitas, menekankan pertumbuhan pendapatan absolut, tidak mengukur aktivitas di luar pasar atau transaksi informal, mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, dan mengabaikan distribusi pendapatan.

Fleurbay (2009) mengungkapkan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) sebagai ukuran aktivitas ekonomi mengabaikan perubahan jasa produksi rumah tangga, kekayaan, kualitas hubungan sosial, kerusakan lingkungan alam, keselamatan pribadi dan keamanan ekonomi, serta harapan hidup. Kelemahan ini telah mendorong perlunya kegiatan yang lebih penting dari *Gross Domestic Product* (GDP), dimana sejak tahun 1970 an memunculkan berbagai ukuran alternative di antara lain *Measure Of Economic Welfare* (MEW) oleh Nordhaus dan Tobin, *Physical Quality Of Life Index* (PQLI) oleh Morris pada tahun 1970an, *Index of Sustainable Economic Welfare* (ISEW) (Daly et al. 1989), *Human Development Index* (HDI) di tahun 1990an, *The Genuine Progress Indicator* (GPI) serta *The Index of Economic Well-Being* (IEWB) (Osberg & Sharpe 1998). HDI digunakan di seluruh dunia namun masih memiliki kekurangan sehingga muncul *Inequality-adjusted Human Development Index* (IHDI) pada tahun 2010.

Sejak Konferensi Beyond GDP oleh Komisi Eropa pada November 2007, berbagai alternatif telah muncul untuk mengoreksi GDP yaitu Indeks Kesejahteraan Berkelanjutan, Indeks Kemajuan Riil, Green GDP, Kekayaan Riil (Costanza et al., 2009) dan Indeks Kemajuan Sosial. Ukuran yang mencakup indikator psikologis adalah *happiness indicators*, *Gallup-Healthways Well-being Index* dan *Happy Life Years Index*. Ukuran pelengkap GDP adalah *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Indicators*. Berbagai ukuran tersebut belum banyak digunakan kecuali MDGs.

Indeks kebahagiaan yang saat ini dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan adalah indeks kebahagiaan. Pada tahun 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menggunakan indeks tersebut, yang kemudian diperluas ke Inggris, Prancis, Australia, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan laporan *World Happiness Report* di antara beberapa negara ASEAN posisi Indonesia terlihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rangking negara di ASEAN dalam *World Happiness Report* Periode 2020-2021

Negara ASEAN	Tahun 2020	Tahun 2021
Singapura	31	32
Thailand	54	53
Philipina	52	60
Vietnam	83	77
Malaysia	82	79
Indonesia	84	80

Sumber: World Happiness Report 2021

Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas, dimana pada negara ASEAN Singapura menjadi negara pada tingkat pertama yang selanjutnya diikuti

oleh negara Thailand, Philipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Dimana diantara negara-negara ASEAN tersebut, terdapat beberapa negara yang mengalami peningkatan ranking dari tahun sebelumnya diantaranya adalah negara Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, akan tetapi negara Philipina mengalami penurunan ranking dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 peringkat Indonesia dilihat dari keseluruhan negara-negara di dunia menempati peringkat ke-84 dari 156 negara, dan pada tahun 2021 dimana Indonesia menempati peringkat ke-80 dari 156 negara yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan indeks kebahagiaan berdasarkan pada beberapa penilaian antara lain *Gross Domestic Products* (GDP) per kapita, kebebasan dalam pilihan hidup, kemurahan hati, persepsi korupsi, harapan hidup sehat, dan dukungan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang menurut Fery dan Stutzer (2002). Dimana hal tersebut mencakup faktor ekonomi dan faktor demografi. Variabel demografi dimana terdiri dari kesehatan, status pernikahan, usia, jenis kelamin dan pendidikan. Dari sisi ekonomi, faktor penentu utama yang mempengaruhi kebahagiaan individu adalah pendapatan. Semua faktor tersebut selanjutnya akan mempengaruhi seberapa bahagia individu dalam hidupnya, dimana dalam hal tersebut dapat dipergunakan sebagai pendekatan bagi kesejahteraan secara subyektif.

Kebahagiaan seseorang ditentukan dan seringkali masih dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Peningkatan pendapatan di Amerika

Serikat tidak membuat seseorang menjadi lebih bahagia (Easterlin: 1974). Oleh karenanya, akan memunculkan suatu fenomena. Fenomena ini yang dikenal dengan istilah *Easterlin Paradox*. Pada beberapa negara Eropa, fenomena peningkatan pendapatan ini tidak menjamin kebahagiaan seseorang ternyata masih dijumpai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan memiliki kelemahan dalam merepresentasikan kebahagiaan.

Salah satu tujuan pemerintahan negara Indonesia yang dibentuk dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban guna menjamin dan mendorong upaya peningkatan dan pencapaian kesejahteraan setiap warga negara. Konsep kesejahteraan sebagaimana dikemukakan oleh para pendiri negara Indonesia, tampaknya tidak hanya menggambarkan kondisi kemakmuran materiil (*welfare, beingwell atau prosperity*) tetapi juga mengarah pada konsep kebahagiaan (*happiness*). Makna dan ruang lingkup kebahagiaan tidak terbatas pada kondisi kehidupan yang menyenangkan dan kondisi kehidupan yang baik (*being-well or good life*), tetapi juga mencakup kondisi kehidupan yang bermakna.

Indeks Kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang diberi bobot dengan menggunakan dimensi dan indikator dari 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai indeks, semakin bahagia kehidupan penduduk. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeksnya, maka semakin tidak bahagia taraf hidup penduduknya. Indeks kebahagiaan adalah suatu konsep yang

berwujud hasil evaluasi kehidupan, dan menggambarkan kondisi hidup yang baik dan hidup yang bahagia. Disusun dari tiga konsep yang berbeda namun berkaitan, yaitu: kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*), dan makna hidup (*Eudaimonia*) (Lopies & Matdoan, 2021).

Indeks Kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat, tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu uji coba tahun 2012 dan 2013, kemudian survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) sebanyak 3 kali, tahun 2014, 2017, dan 2021. Dalam perhitungan indeks Kebahagiaan pada tahun 2017 hingga 2021 berbeda metodenya dengan tahun 2014. Dimana penghitungan Indeks Kebahagiaan pada tahun 2017-2021 metodenya diukur dengan menggunakan tiga dimensi yaitu: Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), Perasaan (*Affect*), dan Makna Hidup (*Eudaimonia*). Sedangkan penghitungan Indeks Kebahagiaan pada tahun 2014 metodenya diukur menggunakan satu dimensi yaitu Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*). Hasil survei terbaru yang dirilis BPS pada akhir Desember 2021, Indeks Kebahagiaan 2021 Indonesia naik sebesar 0.80 poin. Jika pada 2017 indeks kebahagiaan tercatat 70.69 maka pada 2021 menjadi 71.49, dengan skala 0 sampai 100. Angka ini tentu juga lebih tinggi dibandingkan pada 2014 yang sebesar 68.28. Padahal, tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19 masih melanda. Dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Capaian Indeks Kebahagiaan Provinsi di Indonesia
Tahun 2014, 2017 dan 2021

Provinsi	Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi		
	2014	2017	2021
Aceh	67.48	71.96	71.24
Sumatera Utara	67.65	68.41	70.57
Sumatera Barat	66.79	72.43	71.34
Riau	68.85	71.89	71.80
Jambi	71.10	70.45	75.17
Sumatera Selatan	67.76	71.98	72.37
Bengkulu	67.43	70.61	69.74
Lampung	67.92	69.51	71.64
Kep. Bangka Belitung	68.45	71.75	73.25
DKI Jakarta	69.21	71.33	70.68
Jawa Barat	67.66	69.58	70.23
Jawa Tengah	67.81	70.92	71.73
DIY	70.77	72.93	71.70
Jawa Timur	68.70	70.77	72.08
Banten	68.24	69.83	68.08
Bali	68.46	72.48	71.44
NTB	69.28	70.70	69.98
NTT	66.22	68.98	70.31
Kalimantan Barat	67.97	70.08	72.49
Kalimantan Tengah	70.01	70.85	73.13
Kalimantan Selatan	70.11	71.99	73.48
Kalimantan Timur	71.45	73.57	73.49
Kalimantan Utara	-	73.33	76.33
Sulawesi Utara	70.79	73.69	74.96
Sulawesi Tengah	67.92	71.92	74.46
Sulawesi Selatan	69.80	71.91	73.07
Sulawesi Tenggara	68.66	71.22	73.98
Gorontalo	69.28	73.19	74.77
Sulawesi Barat	67.86	70.02	73.46
Maluku	72.12	73.77	76.28
Maluku Utara	70.55	75.68	76.34
Papua Barat	70.45	71.73	74.52
Papua	60.97	67.52	69.87
Indonesia	68.28	70.69	71.49

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun 2021, BPS melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) untuk ketiga kalinya, setelah tahun 2014 dan 2017.

Tujuan umum dilakukannya Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan tahun 2021 adalah untuk memperoleh informasi detail tentang tingkat kebahagiaan. Dimana data yang telah dikumpulkan dalam Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2021 adalah informasi rinci mengenai tingkat kebahagiaan yang diukur dengan variabel yang berbeda. Pendataan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Pertanyaan yang dikumpulkan dalam Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. Keterangan individu responden terpilih;
2. Keterangan perilaku responden terkait kepedulian lingkungan hidup.
3. Keterangan kehidupan responden mencakup: afeksi (perasaan), eudaimonia (makna hidup), dan evaluasi kehidupan;
4. Keterangan umum anggota rumah tangga dan keluarga;
5. Keterangan perumahan dan aset rumah tangga;

Tabel 1. 3
Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia

Indikator Penyusun	Tahun 2014	Tahun 2017	Tahun 2021
Pendapatan Rumah Tangga	63.09	62.99	67.80
Kondisi Rumah dan Aset	65.01	69.28	73.22
Pekerjaan	67.08	67.15	73.19
Pendidikan	58.28	59.90	56.81
Kesehatan	69.72	71.12	76.53
Ketersediaan Waktu Luang	71.74	72.08	77.96
Hubungan Sosial	74.29	75.45	85.03
Keharmonisan Keluarga	79.89	80.05	86.91
Kondisi Keamanan	76.63	77.15	86.29
Keadaan Lingkungan	74.48	76.09	84.32

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada Tabel 1.3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata dari sepuluh indikator yang membentuk indeks kebahagiaan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya bahagia pada tahun 2014, 2017, dan 2021. Terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan di Indonesia tidak hanya pendapatan tetapi juga faktor sosial.

Pada tahun 1974 Easterling adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, Easterling mengemukakan bahwa peningkatan pendapatan seseorang tidak secara bersamaan meningkatkan kesejahteraannya. Situasi ini menunjukkan *paradox of happiness* atau *income paradox*, atau lebih dikenal dengan sebutan *Easterlin Paradox*. Clark, Frijters, dan Shields (2008) juga mendapatkan hasil penelitian yang sama dimana berpendapat bahwa adanya *Easterlin Paradox* dapat menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan selain faktor pendapatan. Faktor non-material yang berperan penting dalam kesejahteraan adalah yang berkaitan dengan dimensi sosial kesejahteraan manusia (Helliwell dalam Rahayu: 2016). Bartolini dan Bilancini (2010) juga percaya bahwa kualitas dan kuantitas hubungan sosial merupakan faktor penting yang meningkatkan kesejahteraan subjektif. Hasil penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa kohesi sosial merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan hidup seseorang (Berger-Schmitt, 2002). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-**

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS KEBAHAGIAAN:
Studi Kasus *Indonesia Family Life Survey (IFLS) Tahun 2014*”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel pendapatan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh variabel status pekerjaan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh variabel status pernikahan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh variabel jenis kelamin terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh variabel status kesehatan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendapatan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel status pekerjaan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel status pernikahan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel jenis kelamin terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh variabel status kesehatan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti dan Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan di dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kebahagiaan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai referensi bagau pemerintah di Indonesia di dalam hal pembuatan kebijakan yang memasukan faktor kebahagiaan untuk kedepannya dan dengan ini juga pemerintah dapat meningkatkan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan indeks kebahagiaan di Indonesia.